

Integrasi Nilai Toleransi, Gotong Royong, dan Anti-Korupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Ketahanan Industri pada Era Society 5.0

Irfandi

Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

irfandi@umpalopo.ac.id

Kata Kunci:

Nilai Toleransi, Gotong Royong, Anti-Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya kajian yang mengaitkan pendidikan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan ketahanan industri pada era Society 5.0. Selama ini, PKn lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan pembentukan karakter dalam konteks sosial-politik, sementara relevansinya dengan kebutuhan industri modern yang menuntut sumber daya manusia berintegritas, kolaboratif, dan adaptif masih belum banyak dikaji secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi dan menganalisis integrasi nilai toleransi, gotong royong, dan anti-korupsi dalam PKn sebagai fondasi penguatan ketahanan industri. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, kebijakan, dan dokumen relevan yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai toleransi berperan dalam membangun lingkungan kerja inklusif dan kolaboratif, gotong royong memperkuat budaya kerja kolektif dan adaptif, serta nilai anti-korupsi menjadi dasar tata kelola yang transparan dan berintegritas. Integrasi ketiga nilai tersebut dalam pembelajaran PKn secara sistematis dan kontekstual terbukti mampu mendukung pembentukan karakter sumber daya manusia yang responsif terhadap dinamika industri modern. Dengan demikian, PKn memiliki peran strategis dalam menjembatani pendidikan karakter dengan kebutuhan dunia industri berbasis teknologi.

Key Word:

Tolerance Value, Gotong Royong, Anti-Corruption, Civic Education

Abstract

This research is motivated by the limited studies that relate character education in Civic Education (PKn) to industrial resilience in the Society 5.0 era. So far, PKn has focused more on normative aspects and character formation in socio-political contexts, while its relevance to the needs of modern industries that demand human resources with integrity, collaborative, and adaptive has not been comprehensively studied. This research aims to construct and analyze the integration of tolerance, mutual cooperation, and anti-corruption values in PKn as the foundation for strengthening industrial resilience. The method used is a qualitative approach with the type of literature research through the tracing of various scientific sources, policies, and relevant documents that are analyzed thematically. The results of the study show that the value of tolerance plays a role in building an inclusive and collaborative work environment, mutual cooperation strengthens a collective and adaptive work culture, and anti-corruption values are the basis for transparent and integrity governance. The integration of these three values in civic learning systematically and contextually has proven to be able to support the formation of human resource characters that are responsive to modern industrial dynamics. Thus, PKn has a strategic role in bridging character education with the needs of the technology-based industrial world.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)



PENDAHULUAN

Ketahanan industri pada era ini tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kualitas nilai sosial-budaya yang mengiringinya. Menurut Nakamura (2019), Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dan menekankan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan, sehingga penguatan karakter menjadi kebutuhan strategis bagi pembangunan bangsa. Dalam konteks pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran sangat strategis sebagai mata kuliah wajib nasional yang bertujuan membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Dewantara dan Nuryana (2019) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana penguatan karakter berbasis Pancasila yang berfungsi menanamkan nilai toleransi, kerja

sama sosial, dan kejujuran melalui proses pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi langsung terhadap pembentukan sumber daya manusia yang etis dan kolaboratif, sesuai kebutuhan Society 5.0. Suryanto dan Azwar (2020) menegaskan bahwa industri yang berkelanjutan memerlukan kultur kolaboratif, kepercayaan, dan integritas yang kuat untuk menciptakan ekosistem kerja yang stabil dan produktif. Artinya, ketahanan industri tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan sosial.

Perlunya pendekatan pedagogis yang memadukan literasi digital, pendidikan karakter, dan studi kasus industri agar mahasiswa mampu memahami relevansi nilai-nilai kebangsaan dalam konteks profesional. UNESCO (2017) menekankan pentingnya pendidikan karakter global yang mengintegrasikan nilai etika, kolaborasi, dan integritas sebagai prasyarat bagi ketahanan sosial dan ekonomi suatu negara. Transformasi menuju *Society 5.0* menandai perubahan besar dalam relasi manusia, teknologi, dan struktur sosial, termasuk dalam konteks pembangunan industri. Konsep ini menekankan integrasi kecerdasan buatan, data besar, dan *Internet of Things* untuk menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi dan terhubung (Nakamura, 2019). Dalam konteks Indonesia, ketahanan industri sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang melekat pada karakter bangsa, termasuk nilai toleransi, gotong royong, dan integritas anti korupsi. Toleransi diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan inklusif dalam masyarakat yang sangat beragam. Gotong royong berfungsi sebagai modal sosial yang mendorong kolaborasi produktif dan solidaritas dalam menghadapi tantangan industri. Sementara itu, nilai anti korupsi berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik, stabilitas organisasi, serta efisiensi sistem industri nasional (KPK, 2021).

Sumber daya manusia berintegritas merupakan aktor yang menjunjung kejujuran, akuntabilitas, dan etika profesional dalam menjalankan tugas. Dalam konteks industri, integritas berdampak langsung terhadap kualitas layanan, kepercayaan publik, stabilitas produksi, hingga keberlanjutan ekosistem industri (Transparency International, 2023). UNESCO (2019) menekankan pentingnya "*digital civic competence*" sebagai kompetensi yang meliputi berpikir kritis, tanggung jawab digital, kesadaran akan keberagaman, dan partisipasi sosial daring secara produktif. Para pakar menekankan bahwa daya saing suatu industri di era ini bergantung pada kemampuan tenaga kerja memadukan kompetensi teknis dengan *soft skills* seperti kepemimpinan, empati, kecerdasan sosial, kemampuan memecahkan masalah, serta kesadaran moral (World Economic Forum, 2020). Korupsi mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, melemahnya kepercayaan publik, dan terhambatnya kolaborasi antar pelaku industri (OECD, 2020). Kementerian Perindustrian RI (2023) juga menegaskan bahwa ketidakpastian regulasi yang diakibatkan oleh korupsi menurunkan minat investor, baik domestik maupun asing, dan secara langsung mengancam keberlanjutan industri strategis nasional. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2022), banyak kasus korupsi sektor industri terjadi karena lemahnya transparansi rantai pasok, minimnya penerapan *compliance system*, dan kurangnya budaya integritas di lingkungan perusahaan.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan konsep normatif tentang Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi juga menjadi wahana pembentukan karakter warga negara yang berintegritas, demokratis, dan bertanggung jawab (Dewantara & Nuryana, 2019). Dalam perkembangan terbaru, pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk lebih adaptif terhadap tantangan global, termasuk kebutuhan dunia industri terhadap sumber daya manusia yang profesional, etis, dan mampu bekerja dalam lingkungan multikultural. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi memberikan ruang untuk pengembangan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, refleksi kritis, dan penguatan literasi digital bermoral (Kemendikbud, 2020). Ketahanan industri di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, namun juga oleh kualitas nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam organisasi atau lingkungan kerja. Lebih lanjut Banks (2020) menekankan bahwa penguatan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan fondasi untuk membangun masyarakat demokratis dan berkeadaban yang mampu menghadapi tantangan teknologi dan globalisasi. Selain itu Laporan *World Economic Forum* (2020) menunjukkan bahwa kecakapan sosial dan etika menjadi salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia industri masa depan dibandingkan hanya kecakapan teknis.

Lingkungan kerja modern mempertemukan berbagai latar belakang budaya, agama, dan identitas sosial, nilai toleransi dibutuhkan untuk merawat keberagaman tenaga kerja lintas budaya; gotong royong menguatkan kemampuan kerja kolaboratif; sementara anti korupsi menjadi dasar integritas dalam tata kelola industri yang sehat. Banks (2020) menekankan bahwa toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan kunci berkembangnya masyarakat demokratis, termasuk dalam konteks organisasi dan industri yang beroperasi secara global. Selain itu, penelitian Dewantara dan Nuryana (2019) menunjukkan bahwa nilai gotong royong berkontribusi signifikan dalam membangun pola kerja kolektif yang memperkuat efektivitas pembelajaran dan pengambilan keputusan. Namun menurut laporan Komisi Pemberantasan

Korupsi (2021), kerugian industri dan sektor publik akibat tindakan korupsi terus meningkat dan berdampak langsung pada iklim investasi serta produktivitas nasional.

Konsep Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat inovasi, di mana kecerdasan buatan, *big data*, dan *Internet of Things* (IoT) digunakan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan sosial termasuk ketahanan industri, transformasi ekonomi, dan tata nilai moral dalam kehidupan warga negara (*Cabinet Office of Japan*, 2016). Florida (2019) menjelaskan bahwa industri masa depan akan bertumpu pada *creative human capital* yang mampu mengintegrasikan analisis data, intuisi profesional, dan inovasi sosial untuk menciptakan nilai tambah baru. Menurut *World Economic Forum* (2023), industri masa depan membutuhkan talenta yang mampu beradaptasi dengan perubahan cepat, bekerja secara kolektif, dan memegang teguh prinsip etika profesional. Kusumastuti (2021) menjelaskan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai alat; sedangkan manusia adalah pusat kecerdasan kreatif dan etika yang memastikan keberlangsungan industri. Menurut Jefkins dan James (2020), industri yang memiliki kultur kolaboratif lebih mampu mempercepat proses inovasi, meningkatkan ketepatan keputusan, serta memperkuat stabilitas operasional. Amabile (2018) menjelaskan bahwa kreativitas di lingkungan kerja dipengaruhi oleh faktor individual, lingkungan sosial, serta dukungan organisasi. Literatur menunjukkan bahwa integrasi nilai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya model pedagogis inovatif, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pendidikan, serta lemahnya evaluasi sikap dan perilaku peserta didik (Unggul et al., 2021). Kurikulum yang masih berorientasi normatif, metode pembelajaran yang minim praktik kolaboratif, serta belum terhubungnya pendidikan karakter dengan kebutuhan dunia industri menjadi hambatan implementatif (Sutrisno & Sari, 2021). Lickona (2019) menegaskan bahwa pendidikan nilai dan keteladanan merupakan fondasi utama dalam membentuk integritas individu. Kreativitas tidak lagi dipandang sebagai bakat individual, tetapi sebagai kemampuan strategis untuk menghasilkan gagasan baru, memecahkan masalah kompleks, dan menciptakan nilai tambah pada proses produksi maupun layanan industri (Florida, 2014).

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan kajian yang masih terbatas dalam menghubungkan pendidikan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan konteks ketahanan industri pada era Society 5.0. Selama ini, kajian pendidikan kewarganegaraan cenderung berfokus pada aspek normatif dan pembentukan karakter warga negara dalam ranah sosial-politik, sementara keterkaitannya dengan kebutuhan dunia industri modern yang menuntut sumber daya manusia berintegritas, kolaboratif, dan adaptif yang belum banyak dieksplorasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperkuat basis teoretis mengenai integrasi nilai toleransi, gotong royong, dan anti korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pembelajaran yang relevan dengan tuntutan era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pendidik, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan industri dalam merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter yang mendukung ketahanan industri. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep nilai toleransi, gotong royong, dan anti korupsi didefinisikan dan dikonstruksikan dalam literatur akademik sebagai dasar integrasi dalam pendidikan kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran makna, pemahaman mendalam, serta analisis konsep-konsep nilai karakter yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk memperkuat ketahanan industri pada era Society 5.0. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif menekankan interpretasi terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif peneliti serta penggunaan data teks yang dianalisis secara induktif. Metode *library research* relevan dengan tujuan penelitian ini karena integrasi nilai toleransi, gotong royong, dan anti korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan objek kajian konseptual yang dapat dikaji melalui literatur ilmiah, kebijakan publik, serta dokumen kelembagaan.

Library research menurut Zed (2014) merupakan proses pengumpulan, membaca, mengkritisi, dan mengolah sumber informasi tertulis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman baru yang komprehensif mengenai suatu fenomena. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menelusuri teori, regulasi, laporan lembaga internasional, serta karya ilmiah yang membahas hubungan antara nilai karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan ketahanan industri. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian mampu menyajikan analisis mendalam yang bersifat teoritis, sistematis, dan berorientasi pada penguatan model integrasi karakter dalam konteks Society 5.0.

Sumber data dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka diperoleh dari berbagai literatur yang kredibel, relevan, dan mutakhir. Sumber data utama penelitian ini meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga resmi

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan dan kredibel. Buku-buku yang digunakan mencakup kajian mengenai nilai karakter, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, serta pendidikan antikorupsi. Selain itu, artikel jurnal ilmiah yang dijadikan rujukan diperoleh dari publikasi bereputasi, baik yang terindeks Scopus, SINTA, maupun jurnal nasional di bidang pendidikan dan filsafat Pancasila.

Sumber kebijakan yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, serta berbagai pedoman resmi yang berkaitan dengan penguatan nilai karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Di samping itu, laporan internasional dimanfaatkan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan industri di era digital serta kompetensi sumber daya manusia dalam konteks Society 5.0.

Penggunaan beragam sumber tersebut dianalisis melalui pendekatan triangulasi literatur, sehingga data yang diperoleh memiliki validitas akademik yang kuat sekaligus relevan dengan konteks nasional dan global.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu penelusuran, pengumpulan, dan analisis dokumen ilmiah baik cetak maupun digital. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen merupakan proses sistematis dalam meninjau dan menilai dokumen untuk mengekstraksi makna, mendapatkan pemahaman, serta mengembangkan pengetahuan empiris. Teknik dokumentasi digunakan untuk menelaah dan mengidentifikasi berbagai sumber literatur, meliputi buku, artikel jurnal, *e-book*, prosiding, regulasi pemerintah, serta laporan resmi yang relevan dengan kajian nilai toleransi, gotong royong, anti korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan ketahanan industri.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan: Identifikasi literatur berdasarkan kata kunci relevan seperti “*tolerance*”, “*collaboration*”, “*anti-corruption education*”, “*Pancasila values*”, “*civic education*”, dan “*industrial resilience in Society 5.0*” (1). Seleksi dokumen dengan mempertimbangkan kredibilitas, tahun terbit, dan relevansi (2). Eksplorasi mendalam terhadap isi dokumen untuk mengekstraksi informasi mengenai konsep, teori, model integrasi nilai, dan temuan penelitian terdahulu (3). Kategorisasi data sesuai kerangka nilai toleransi, gotong royong, anti-korupsi, pendidikan kewarganegaraan, dan ketahanan industri (4).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyaring informasi penting dari berbagai literatur yang berkaitan dengan nilai karakter dan PKn. Proses reduksi dilakukan untuk merangkum konsep utama namun tetap mempertahankan esensi teoritis dan hubungan antar variabel. Kedua, penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi, tabel konsep, serta peta hubungan antar nilai (toleransi, gotong royong, anti-korupsi) dengan pendidikan kewarganegaraan dan ketahanan industri. Penyajian data bertujuan memberikan gambaran yang jelas sehingga pola-pola tematik dapat diidentifikasi secara sistematis.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Analisis Tematik (*Thematic Analysis*) sebagai teknik untuk menemukan pola makna konseptual dalam literatur. Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik melibatkan proses identifikasi, pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi makna dari berbagai sumber data. Teknik ini digunakan untuk menemukan tema utama seperti “nilai karakter sebagai fondasi industri”, “pendidikan kewarganegaraan sebagai media integrasi nilai”, dan “ketahanan industri dalam Society 5.0”. Melalui analisis tematik, keterkaitan antara nilai toleransi, gotong royong, dan anti-korupsi dengan pembentukan sumber daya manusia berintegritas dan kolaboratif dapat ditarik secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara verifikatif dan berkelanjutan selama proses analisis, sehingga kesimpulan yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep toleransi sebagai nilai universal telah lama ditegaskan UNESCO, melalui *Declaration of Principles on Tolerance* (1995), yang mendefinisikan toleransi sebagai “respek, penerimaan, dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dunia, bentuk-bentuk ekspresi, dan cara menjadi manusia” serta menegaskan bahwa toleransi “difoster oleh pengetahuan, keterbukaan pikiran, dan komunikasi” (UNESCO, 1995). Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), menurut Winataputra (2014) menyebutkan bahwa toleransi tercermin melalui sikap menghargai perbedaan, kesediaan bekerja sama, dan pengendalian diri dalam menghadapi konflik. Sejalan dengan itu, Somantri (2001) menekankan kemampuan menerima keberagaman sosial, budaya, dan politik tanpa prasangka; sementara Wahab (2016) menyoroti indikator berupa keterbukaan pikiran, empati sosial, dan komitmen pada nilai demokrasi. Indikator-indikator ini memberikan

kerangka operasional bagi dosen dan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran berbasis sikap toleransi. Dalam masyarakat digital yang multicultural, Literatur kontemporer mengungkap bahwa masyarakat digital menghadapi tantangan baru dalam membangun toleransi, terutama akibat meningkatnya polarisasi, disinformasi, dan algoritma media sosial yang menciptakan *echo chambers* (Narasimhan et al., 2023). Selain itu penelitian tentang transformasi modal sosial di era digital, Ahdan (2024) menyoroti bagaimana ruang siber mengubah pola interaksi sosial sehingga norma-norma saling menghormati mudah terdistorsi; oleh karena itu literatur merekomendasikan penguatan literasi digital, pendidikan etika bermedia, dan intervensi kurikulum yang menyediakan kesempatan pengalaman langsung, seperti dialog terfasilitasi dan proyek kolaboratif lintas kelompok, sebagai strategi pendidikan kewarganegaraan untuk menanggulangi dampak negatif digitalisasi terhadap toleransi. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembelajaran toleransi harus menggabungkan pengembangan keterampilan kritis media dengan pembelajaran nilai agar warga digital tetap terbuka dan menghargai keberagaman.

Dalam dunia industri modern, pada studi klasik tentang manajemen keragaman menegaskan bahwa organisasi yang mampu mengelola perbedaan budaya secara produktif memperoleh manfaat berupa kreativitas yang lebih tinggi, pengambilan keputusan yang lebih kaya perspektif, serta peningkatan daya saing (Cox & Blake, 1991). Selain itu, toleransi meningkatkan kualitas interaksi antarpekerja, mengurangi konflik interpersonal, dan memperkuat kohesi tim, yang sangat dibutuhkan dalam proses produksi yang bersifat lintas fungsi (Yilmaz & Aykan, 2021). Lebih lanjut, Ikeda (2024) menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan yang memperkuat *soft skills* seperti kemampuan antar budaya dan sikap terbuka, menjadi faktor penting dalam memfasilitasi kerja kolaboratif pada lingkungan berteknologi tinggi sehingga organisasi dapat memanfaatkan keberagaman untuk inovasi sambil mengurangi gesekan interpersonal. Vohra (2015) dalam tinjauan empirisnya menunjukkan bahwa organisasi yang mengadopsi kebijakan inklusi dan membina perilaku toleran melaporkan peningkatan hasil bisnis karena kombinasi pemanfaatan perspektif beragam (menggenjot inovasi) dan pengurangan konflik interpersonal (menurunkan waktu hilang dan gangguan operasi).

Menurut Winataputra dalam buku/kurikulum pendidikan kewarganegaraan (2015), indikator toleransi dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: (1) pengetahuan tentang keragaman budaya, agama, dan pandangan; (2) sikap menghargai perbedaan yang tercermin dalam toleransi verbal dan nonverbal; (3) kompetensi komunikasi antar kultural yang memungkinkan dialog dan negosiasi; (4) kemampuan pengelolaan konflik secara damai; serta (5) praktek partisipasi sosial yang inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Winataputra menekankan bahwa indikator tersebut harus diukur lintas domain (kognitif, afektif, psikomotor) sehingga pembelajaran PKn tidak hanya men-transfer pengetahuan tetapi juga membentuk disposisi dan perilaku toleran yang dapat diamati. Sejalan dengan itu, Lickona (2004) menjelaskan bahwa pendidikan karakter yang menanamkan nilai toleransi dapat membentuk individu yang mampu mengelola konflik, menghargai perbedaan, dan mengutamakan dialog. Implementasi nilai toleransi dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam Kurikulum Merdeka, konsep toleransi diimplementasikan sebagai bagian terintegrasi dari pembelajaran Pendidikan Pancasila (PKn) yang mengedepankan pendekatan *student-centered*, aktivitas kontekstual, dan profil Pelajar Pancasila, seperti berkebinekaan global dan bergotong-royong. Buku teks utama Pendidikan Pancasila (Kemendikbudristek) memformulasikan toleransi bukan sekadar pengetahuan tetapi sebagai kompetensi afektif dan perilaku yang dibangun melalui aktivitas pembelajaran (diskusi, simulasi, proyek lintas kelompok), keteladanan, dan keterlibatan “Tri Pusat Pendidikan” (sekolah, keluarga, komunitas) sehingga nilai toleransi diharapkan terinternalisasi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan ruang kerja multikultural (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Lebih lanjut, Organisasi internasional seperti *World Economic Forum* menempatkan kompetensi social emosional sebagai komponen utama, termasuk kemampuan bekerja sama, komunikasi antar budaya, empati, dan pengelolaan relasi sebagai bagian utama dari “*soft skills*” abad ke-21 yang diperlukan oleh pasar kerja modern; dengan kata lain, toleransi dipandang sebagai elemen kunci dari kecakapan social emosional yang meningkatkan kapasitas kolaborasi, inovasi, dan ketahanan organisasi di tengah transformasi digital dan otomatisasi. Laporan dan tulisan *World Economic Forum* menekankan bahwa pendidikan yang menumbuhkan keterampilan social emosional seperti toleransi akan meningkatkan kesiapan kerja dan adaptabilitas pekerja dalam ekosistem industri yang heterogen dan teknologi tinggi (*World Economic Forum*, 2016).

Temuan empiris dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menunjukkan strategi integrasi toleransi ke dalam pembelajaran kolaboratif melalui desain pembelajaran yang eksplisit menempatkan siswa dalam kelompok heterogen, penggunaan studi kasus dan simulasi konflik antar-kelompok, pemberian tugas proyek lintas budaya, pembiasaan dialog reflektif, serta penilaian formatif yang menilai aspek disposisi

(empati, penghargaan terhadap perbedaan) selain pengetahuan; pendekatan ini menekankan fase perencanaan, implementasi, evaluasi yang disesuaikan untuk inklusi sehingga toleransi berkembang melalui pengalaman praktis kolaboratif dan keteladanan guru (Dwintari & Murdiono, 2023). Johnson & Johnson (2014) menegaskan bahwa interdependensi positif dalam pembelajaran kolaboratif mendorong siswa memahami perspektif berbeda, mengurangi stereotip, serta membentuk hubungan sosial yang inklusif sehingga efektif menginternalisasi nilai toleransi. Hal ini sejalan dengan pandangan Banks (2016) yang menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan multikultural harus menyiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat plural melalui pengalaman belajar yang inklusif dan dialogis.

Selain nilai toleransi, Kaelan (2017) memandang gotong royong sebagai salah satu manifestasi praktis nilai-nilai Pancasila yang menegaskan dimensi sosial kultural kebangsaan; dalam telaahnya gotong royong bukan sekadar kebiasaan tradisional, melainkan wujud konkret penerapan sila-sila Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menuntut partisipasi kolektif, tanggung jawab bersama, dan orientasi pada kesejahteraan publik. Menurut Kaelan (2017) pendidikan Pancasila harus menempatkan gotong royong sebagai muatan nilai yang diinternalisasi melalui kurikulum, keteladanan, dan praktik institusional sehingga menjadi sumber karakter kolektif yang mengikat warga negara dalam tindakan bersama untuk kepentingan kemasyarakatan. Dalam perspektif sosiologi, Suwignyo (2019) menguraikan bagaimana gotong royong berperan sebagai bentuk “*social citizenship*” yang memobilisasi kerja kolektif warga untuk menghadapi tantangan lokal sekaligus membentuk identitas kolektif, tetapi juga mencatat bahwa proses institusionalisasi nilai ini oleh negara dapat mengubah maknanya dan berisiko dieksploitasi, sehingga penguatan solidaritas harus disertai mekanisme partisipasi yang sejati dan akuntabel. Selain itu, Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa gotong royong berfungsi sebagai pranata sosial yang menumbuhkan kohesi, mengurangi konflik, dan memperkuat jaringan sosial berbasis kepercayaan. Lebih lanjut Yuda, Ansori, & Al Faruqi (2022) menekankan peran sinergi antara budaya (gotong royong) dan teknologi digital dalam membangun *resilience* pasca pandemi, misalnya melalui inisiatif kolektif yang dimediasi platform, pemasaran digital kolektif, dan pengorganisasian komunitas berbasis teknologi, meskipun tetap mengingatkan perlunya akses dan literasi digital yang merata agar transformasi ini inklusif.

Dalam konteks industry, Lukiyanto & Wijayaningtyas (2020) menemukan bahwa nilai gotong royong membantu pelaku usaha kecil mengatasi keterbatasan modal dan meningkatkan kapasitas kolektif, dan nilai serupa dapat diterjemahkan ke dalam praktik *teamwork* di industri yang lebih besar melalui pengembangan norma kerja bersama, sistem dukungan antar unit, dan jaringan kepercayaan internal yang meningkatkan efektivitas tim serta ketangguhan organisasi. Seiring perkembangan teknologi, Sairin (2020) menegaskan bahwa masyarakat digital menghadirkan pola baru “gotong royong virtual” yang memanfaatkan media sosial dan teknologi jaringan sebagai sarana memperkuat partisipasi warga dalam aktivitas solidaritas, termasuk bantuan bencana, gerakan sosial, dan pendanaan kolaboratif. Transformasi ini menunjukkan bahwa nilai tradisional dapat beradaptasi secara kreatif dalam struktur sosial modern. Lebih jauh menurut Sutrisno (2019), gotong royong dapat ditransformasikan menjadi etos kerja industri melalui penerapan kerja kolektif, penyelesaian masalah bersama, dan peningkatan produktivitas berbasis solidaritas. Dengan demikian, gotong royong berfungsi sebagai nilai budaya yang kompatibel dengan kebutuhan industri modern yang menuntut sinergi, inovasi tim, dan kemampuan adaptasi tinggi.

Literasi yang terkait budaya kerja, sebagaimana temuan Lee et al. (2018) yang menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya kolaboratif memiliki tingkat efisiensi operasional lebih tinggi dan kecepatan inovasi yang lebih baik karena karyawan saling berbagi informasi, membantu penyelesaian tugas, serta aktif menemukan solusi berbasis teknologi. Temuan pada studi komunitas dan usaha mikro menunjukkan bahwa praktik gotong royong menurunkan hambatan biaya, mempercepat pengambilan keputusan kolektif, dan mendorong adaptasi inovatif yang semuanya relevan ketika perusahaan menghadapi tantangan integrasi teknologi seperti otomatisasi, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) pada era Industri 4.0/5.0, karena modal sosial memperkuat kapasitas organisasi untuk berkolaborasi lintas fungsi dan berinovasi bersama (Lukiyanto, 2020). Hal lainnya sebagaimana dalam Dokumen resmi Profil Pelajar Pancasila menempatkan bergotong royong sebagai salah satu dari enam elemen karakter yang harus dikembangkan, dengan indikator seperti kolaborasi, kepedulian, dan kemampuan berbagi. Implementasinya didukung metode pembelajaran berbasis proyek, kegiatan lintas kurikuler, serta penilaian autentik untuk menumbuhkan kemampuan bekerja sama; kehadiran bergotong royong dalam dokumen resmi kurikulum menandakan upaya sistemik untuk menjadikan nilai kolektivitas ini sebagai kompetensi yang dapat diukur dan diarahkan dalam proses pendidikan formal, sehingga menjadi landasan kebijakan bagi integrasi nilai-nilai kerja tim di ranah akademik dan profesional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021). Lebih lanjut penelitian implementasi Profil Pelajar Pancasila (dimensi bergotong royong)

di sekolah dasar menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan, pelaksanaan proyek bersama, dan evaluasi reflektif memperkuat sikap tolong menolong, keterampilan komunikasi, dan tanggung jawab kolektif, yang pada akhirnya indikator etos kolaboratif dapat ditransfer ke konteks perguruan tinggi dan dunia industri sebagai disposisi kerja tim yang produktif (Oktavia, 2024). Selain itu, tingkat kolaborasi digital yang tinggi berkorelasi positif dengan pemulihan lebih cepat dari gangguan serta kemampuan inovasi proses, sehingga kolaborasi menjadi mekanisme kunci untuk membangun ketahanan industri di era yang didorong teknologi (Jia et al., 2024).

Dengan temuan penelitian Salas et al. (2015) yang menunjukkan bahwa kerja tim yang kuat mempercepat koordinasi, meningkatkan kinerja adaptif, dan memfasilitasi pembelajaran organisasi dalam menghadapi tantangan teknologi. Dari perspektif budaya, Hofstede (2011) menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki nilai kolektivisme tinggi cenderung menunjukkan kohesi sosial lebih kuat, berorientasi pada kerja tim, dan memiliki konflik interpersonal yang lebih rendah dibandingkan budaya individualis, hal yang relevan dengan dinamika gotong royong dalam konteks industri modern. Lebih lanjut, dalam modul Pendidikan Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) menegaskan bahwa proses pendidikan harus mengembangkan kesadaran kritis terhadap dampak korupsi serta membangun kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan perilaku koruptif. Di sisi lain, *Transparency International* (2020) menegaskan bahwa sistem pendidikan harus melatih peserta didik untuk berpikir kritis terhadap sumber-sumber penyimpangan kekuasaan dan mempromosikan etika publik. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui modul pendidikan anti korupsi dan integritas menegaskan bahwa integritas adalah konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan yakni bertindak sesuai prinsip moral dan aturan yang berlaku sementara pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang menolak praktik korupsi; dalam praktik pendidikan, ini diterjemahkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab publik, transparansi, dan keberanian moral melalui pendekatan partisipatif, studi kasus, serta pembiasaan perilaku etis dalam lingkungan akademik (ACLC KPK, 2021).

Dalam membangun sistem industri, Huberts (2018) menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi perilaku etis dalam profesi dan harus dibentuk melalui proses internalisasi nilai yang sistematis sejak dunia pendidikan. Modul dan program pendidikan antikorupsi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pendekatan holistik: (1) pemahaman kognitif tentang bentuk-bentuk korupsi dan konsekuensinya; (2) internalisasi nilai melalui studi kasus, diskusi reflektif, dan simulasi dilema etis; serta (3) penguatan sikap dan perilaku melalui praktik keteladanan dan mekanisme penguatan institusional, sehingga peserta didik tidak hanya paham aturan tetapi juga memiliki landasan moral dan profesional untuk menolak praktik koruptif di lingkungan kerja (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Mauro (1995) menunjukkan bahwa korupsi secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi kualitas kebijakan publik dan kepercayaan pelaku industri, sehingga mengancam ketahanan dan keberlanjutan sektor industri dalam jangka panjang. Lebih lanjut *World Economic Forum* (2020) menekankan bahwa integritas tata kelola merupakan faktor krusial bagi ketahanan industri, dan negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami pelemahan daya saing dalam jangka panjang. Palanski dan Yammarino (2007) menegaskan bahwa integritas merupakan prediktor kuat terhadap kinerja organisasi, karena mampu memperkuat budaya kepercayaan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Pendidikan antikorupsi yang efektif umumnya seperti Modul pendidikan antikorupsi resmi KPK menekankan pendekatan berulang, kontekstual, dan multisektoral; yang mengajarkan pengetahuan hukum, membangun sikap, serta mempraktikkan perilaku antikorupsi melalui tugas terstruktur dan refleksi sebagai langkah sistematis internalisasi nilai pada peserta didik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018). Selain itu, perkembangan moral peserta didik dipengaruhi oleh kemampuan menalar secara etis melalui situasi nyata dan dilematis (Rest, 1986). Adapun pendekatan inovatif seperti *Problem-Based Learning* (PBL) dalam pendidikan antikorupsi menunjukkan PBL meningkatkan kesadaran etika, kemampuan analisis, dan komitmen integritas mahasiswa ketika didukung oleh pelatihan dosen dan dukungan institusional (Istikayati, Wayanti, & Rodiyatun, 2025).

Dalam praktik industri, perusahaan dengan tingkat integritas tinggi memiliki ketahanan organisasi yang lebih baik terhadap krisis serta mampu beradaptasi secara berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif (*Transparency International*, 2020); studi dan pedoman internasional menekankan kombinasi kebijakan antikorupsi dan solusi digital meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi serta memperkuat kepercayaan pasar dan regulator (World Bank, 2020). Dengan demikian prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab mendorong industri untuk mengadopsi sistem digital seperti *e-procurement*, pelaporan keuangan berbasis daring, dan audit berbasis teknologi yang meminimalkan celah manipulasi. *World*

Economic Forum (2021) menekankan bahwa integrasi nilai integritas dengan teknologi digital mampu menciptakan *clean governance ecosystem* yang memperkuat kepercayaan publik dan efisiensi industri. Dengan demikian, anti-korupsi tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai fondasi tata kelola industri modern yang berkelanjutan di era Society 5.0.

Secara lebih luas, hasil studi lintas negara menunjukkan bahwa program pendidikan kewarganegaraan yang efektif menggabungkan pembelajaran kognitif dengan pengalaman partisipatif seperti diskusi deliberatif, simulasi warga, dan proyek komunitas, sehingga pengetahuan tidak sekadar dimiliki tetapi juga diinternalisasi menjadi keterampilan praktis dan disposisi moral yang bertahan lama; hal ini menegaskan peran pendidikan kewarganegaraan sebagai fondasi pembentukan warga negara yang mampu berkontribusi pada kehidupan politik dan sosial yang sehat (Torney-Purta, Lehmann, Oswald, & Schulz, 2001). Dalam kerangka teoritis, pendidikan kewarganegaraan menempatkan pendidikan karakter sebagai inti dari tujuan pendidikan kewarganegaraan: bukan hanya mentransfer pengetahuan tentang sistem kenegaraan, melainkan membentuk moral dan etika publik melalui pembiasaan nilai, keteladanan, serta integrasi nilai Pancasila dalam seluruh aktivitas pembelajaran; hingga menekankan pendekatan holistik yang memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan pendidikan karakter menjadi landasan yang mengarahkan kurikulum, metode pembelajaran, dan asesmen sehingga peserta didik tidak hanya memahami norma sipil tetapi juga menghayatinya sebagai disposisi yang mengarahkan perilaku sosial dan profesional (Winataputra & Wahab, 2012). Dokumen kurikulum resmi seperti buku teks dan kerangka capaian Kurikulum 2013/Kurikulum Merdeka, menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengakomodasi nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan anti korupsi melalui integrasi kompetensi sikap (KI-1/KI-2), muatan pembelajaran kontekstual, dan aktivitas pembelajaran berbasis proyek atau pelayanan masyarakat; materi dan indikator capaian menuntut siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga menunjukkan perilaku nyata seperti praktek kerjasama, refleksi etis, dan penolakan terhadap praktik koruptif; sementara asesmen mencakup penilaian sikap dan portofolio yang memantau internalisasi nilai tersebut secara berkelanjutan. Dokumen buku ajar Pendidikan Pancasila/Pendidikan Kewarganegaraan dari Kemendikbud mempertegas pendekatan ini sebagai bagian dari profil Pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Dengan demikian, dibandingkan dengan mata pelajaran lain, yang mungkin menanamkan nilai karakter lewat konten tematik (misalnya: literasi moral di Bahasa atau kerja sama di Pendidikan Jasmani), pendidikan kewarganegaraan menggabungkan dimensi normatif (kewargaan), prosedural (partisipasi), dan etis (integritas publik) secara eksplisit sehingga menjadi arena utama untuk menginternalisasi nilai-nilai yang berkaitan langsung dengan ketahanan sosial dan tata kelola publik (Lickona, 2012). Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan yang menekankan partisipasi, tanggung jawab sosial, dan integritas akan menghasilkan sumber daya manusia industri yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial terhadap lingkungan kerja dan masyarakat luas (Schulz et al., 2016). Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan modern harus mempersiapkan warga agar mampu hidup bertanggung jawab, berkolaborasi, dan beretika dalam masyarakat berbasis teknologi cerdas (OECD, 2019).

Dalam menghadapi tantangan era Society 5.0, penggunaan media digital yang dirancang secara pedagogis mampu meningkatkan empati, kesadaran sosial, dan tanggung jawab warga digital, asalkan disertai bimbingan etika dan literasi kritis dari pendidik (Ribble, 2015). Dengan demikian *Instructional design* pendidikan kewarganegaraan yang efektif untuk mengintegrasikan nilai karakter menuntut perencanaan sistematis yang mengaitkan tujuan pembelajaran, materi, metode, dan asesmen dengan dimensi nilai secara eksplisit. Desain pembelajaran perlu mengombinasikan strategi kognitif (analisis isu kewarganegaraan), afektif (refleksi nilai), dan behavioral (praktik partisipatif) melalui pendekatan seperti *value based learning*, *problem based learning*, dan pembelajaran berbasis proyek sosial. Model desain ini memastikan bahwa nilai karakter tidak hanya diajarkan sebagai konten, tetapi diinternalisasi melalui pengalaman belajar yang bermakna dan berkelanjutan (Lickona, Schaps, & Lewis, 2007). Dalam konteks evaluasi pembelajaran, asesmen sikap dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai indikator penting yang dapat memprediksi kecenderungan perilaku profesional peserta didik di masa mendatang karena sikap memengaruhi niat dan niat tersebut memediasi tindakan aktual; hal ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan membentuk *behavioral intention* yang kemudian menerjemah ke tindakan nyata (Ajzen, 1991).

Pada jenjang pendidikan tinggi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat kompetensi kewargaan digital melalui kurikulum eksplisit yang menggabungkan literasi media, etika digital, keamanan data, dan praktik partisipasi digital yang bertanggung jawab; bukti empiris dari intervensi

kurikulum digital menunjukkan peningkatan skor kompetensi digital dan perilaku *online* yang lebih bertanggung jawab pada mahasiswa setelah modul terstruktur diterapkan (Bal et al., 2024). Dalam era Society 5.0 sebagai “*human centered society*” yang mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik untuk menyelesaikan masalah sosial sambil menjaga kesejahteraan; dokumen resmi menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga transformasi digital harus berpadu dengan penguatan kualitas hidup (Cabinet Office, Government of Japan, 2016). Dalam konteks dunia industri, organisasi yang mengedepankan nilai kolaborasi dan integritas cenderung memiliki tingkat adaptabilitas dan resilien yang lebih tinggi ketika menghadapi gangguan teknologi atau rantai pasok, karena sumber daya manusia yang beretika dan kolaboratif memfasilitasi koordinasi cepat dan pengambilan keputusan yang dapat dipercaya (Kolade, 2022). Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *AI* dan *big data* meningkatkan kemampuan organisasi mengekstrak wawasan dari banyak sumber dan perspektif; namun potensi inovasi tersebut baru optimal jika kultur organisasi menghargai perbedaan dan mendorong kolaborasi lintas disiplin (Värzaru et al., 2024).

Nilai gotong royong dalam konteks Indonesia menemukan bahwa praktik gotong royong memperkuat jejaring sosial, memfasilitasi berbagi sumber daya dan pengetahuan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat/UKM untuk beradaptasi terhadap krisis (Lukiyanto, 2020). Sedangkan upaya menjamin transparansi dan keberlanjutan sistem industri, Laporan *World Investment Report* menegaskan bahwa kualitas institusi, termasuk pengendalian korupsi dan transparansi, menjadi determinan penting aliran FDI dan stabilitas investasi jangka panjang; bukti panel ekonomi juga menunjukkan hubungan negatif yang jelas antara persepsi korupsi (*Corruption Perceptions Index*) dan masuknya investasi (UNCTAD, 2024). Lebih lanjut, studi mengenai perilaku organisasi menunjukkan bahwa dimensi *organizational citizenship behavior* (OCB) seperti *altruism*, *conscientiousness*; meningkatkan koordinasi antar unit, mengurangi hambatan informasi, dan mempercepat pemulihan operasional selama gangguan rantai pasok; konsekuensinya, perusahaan dengan budaya tenaga kerja karakter kuat menunjukkan tingkat *resilience* dan keberlanjutan *supply chain* yang lebih tinggi (Khan, 2025). Selain itu, pengembangan *character strengths* di pendidikan tinggi berkontribusi pada kemampuan adaptasi, kolaborasi antar budaya, dan ketahanan belajar yang menjadi modal penting ketika lulusan bekerja dalam ekosistem yang intensif teknologi dan sangat tergantung pada kerja tim lintas disiplin. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang sistematis di perguruan tinggi mampu memperbaiki *employability* dan kesiapan sumber daya manusia menghadapi tantangan Society 5.0 (Mar, 2025).

Hallegatte (2014) merangkum pendekatan pengukuran ketahanan ekonomi yang formal dengan menggunakan indeks komposit, analisis volatilitas output, dan metrik pemulihan serta menekankan bahwa aspek non-teknis seperti kualitas sumber daya manusia dan tata kelola termasuk transparansi dan integritas, menjadi determinan penting dalam menentukan seberapa cepat dan efektif industri dapat pulih dari gangguan. Sejalan dengan itu, kerangka kompetensi etika yang mengintegrasikan nilai ke dalam *competency models* melalui definisi perilaku observabel, indikator penilaian, dan program pengembangan yang memudahkan organisasi untuk merekrut, melatih, dan mengevaluasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri modern. Dengan demikian, kerangka nilai tersebut dapat dipetakan langsung ke dalam *job descriptions*, indikator kinerja, serta paket pelatihan untuk sumber daya manusia Society 5.0 (Dutta, Mishra & Budhwar, 2022). Lebih lanjut, Torney-Purta et al. (2001), pendidikan kewarganegaraan yang efektif mampu memfasilitasi perolehan *civic knowledge*, *civic attitudes*, dan *civic engagement* yang berimplikasi langsung pada etika kerja, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan berkolaborasi dalam kerangka kerja profesional. Dalam konteks organisasi modern, Tjosvold et al. (2014): kompetensi tim yang efektif dalam organisasi modern mencakup keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik antarbudaya, dan kemampuan bekerja dalam tim yang beragam, semua aspek tersebut memiliki akar nilai toleransi dan gotong royong. Selain itu, integritas yang tercermin dari sikap anti korupsi merupakan bagian dari etika kerja profesional yang mendukung praktik manajemen yang baik, kredibilitas perusahaan, dan loyalitas pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai toleransi, gotong royong, dan antikorupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan strategi fundamental dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan era Society 5.0. Toleransi terbukti berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, harmonis, dan produktif, terutama dalam konteks masyarakat dan industri yang semakin beragam serta terdigitalisasi. Kemampuan menghargai perbedaan, berkomunikasi secara efektif, dan mengelola konflik secara konstruktif menjadi modal utama dalam

mendukung kolaborasi lintas budaya dan peningkatan inovasi di sektor industri. Selanjutnya, nilai gotong royong menunjukkan relevansi yang kuat sebagai dasar pembentukan budaya kerja kolaboratif. Transformasi nilai ini dari konteks sosial tradisional ke dalam praktik industri modern memperlihatkan bahwa kerja sama, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses adaptasi teknologi, serta memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika perubahan. Gotong royong tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial yang strategis dalam membangun *teamwork* yang efektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, nilai anti korupsi menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola industri yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi moral terbukti memiliki dampak langsung terhadap stabilitas organisasi, kepercayaan publik, serta keberlanjutan investasi industri. Dalam konteks ini, integritas tidak hanya dipahami sebagai nilai etis, tetapi juga sebagai faktor strategis yang menentukan daya saing dan ketahanan industri dalam jangka panjang, khususnya di tengah kompleksitas sistem digital dan globalisasi ekonomi. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai wahana integratif dalam menanamkan ketiga nilai tersebut secara sistematis melalui pendekatan pembelajaran yang holistik. Melalui penguatan aspek kognitif, afektif, dan perilaku, pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya memahami nilai, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sosial dan profesional. Pemanfaatan desain pembelajaran berbasis nilai, teknologi digital, serta pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam menginternalisasi karakter toleran, kolaboratif, dan berintegritas pada peserta didik. Dalam perspektif yang lebih luas, ketahanan industri pada era Society 5.0 tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas karakter sumber daya manusia yang mengelolanya. Integrasi nilai toleransi, gotong royong, dan anti korupsi dapat dipetakan sebagai kompetensi inti yang mendukung kemampuan adaptasi, inovasi, dan keberlanjutan industri. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai jembatan strategis yang menghubungkan pendidikan karakter dengan kebutuhan nyata dunia industri, sehingga mampu menghasilkan generasi yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas dalam menghadapi transformasi global.

DAFTAR REFERENSI

- ACLIC KPK. (2021). Modul integritas untuk umum (ACLIC KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Ahdan, S. (2024). Transformation of social capital in a digital society. *Jurnal Sosiologi dan Manajemen*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/download/27220/11131/102175>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amabile, T. M. (2018). *Creativity in context: Update to the social psychology of creativity*. Routledge.
- Arthur, J. (2024). Character education in universities: Principles, evidence and implementation challenges. *Journal of Character Education*, 20(1), 1–18.
- Bal, E., et al. (2024). The implementation of a sustainable online course for developing digital citizenship in higher education. *Sustainability*, 16(1), 445. <https://doi.org/10.3390/su16010445>
- Banks, J. A. (2016). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). Routledge.
- Banks, J. A. (2020). *Civic education and global citizenship*. Routledge.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Cabinet Office, Government of Japan. (2016). Society 5.0: A human-centered society. https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html
- Cox, T. H., & Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness. *Academy of Management Executive*, 5(3), 45–56. <https://doi.org/10.5465/AME.1991.4274465>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.
- Declaration of Principles on Tolerance. (1995). UNESCO. Retrieved from <https://www.oas.org/dil/1995%20Declaration%20of%20Principles%20on%20Tolerance%20UNESCO.pdf>
- Dewantara, A. H., & Nuryana, Z. (2019). Character education based on Pancasila values. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(4), 105–120.

- Dwintari, J. W., & Murdiono, M. (2023). The strategy of integrating tolerance values into civics learning in inclusive school. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 214–222. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.42158>
- Dutta, D., Mishra, S. K., & Budhwar, P. (2022). Ethics in competency models: A framework towards developing ethical behaviour in organisations.
- Florida, R. (2014). The rise of the creative class revisited. Basic Books.
- Florida, R. (2019). The rise of the creative class. Basic Books.
- Hallegatte, S. (2014). Economic resilience: Definition and measurement (World Bank Policy Research Working Paper No. 6852). World Bank.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2011). Cultures and organizations: Software of the mind (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Huberts, L. (2018). Integrity: What it is and why it is important. *Public Integrity*, 20(1), 18–32.
- Ikeda, K. (2024). Aiming to Build Future Skills for Society 5.0: Educational perspectives (Book chapter). In *Educational Innovation in Society 5.0 Era: Challenges and Perspectives*. Springer.
- Istikayati, S. N., Wayanti, S., & Rodiyatun, R. (2025). The effectiveness of problem-based learning strategies and integrity values in anti-corruption education in higher education. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika*. <https://doi.org/10.59613/armada.v6i1.5402>
- Jefkins, F., & James, M. (2020). Interpersonal communication in organizations. Routledge.
- Jia, L., et al. (2024). How does digital collaboration impact supply chain resilience? *International Journal of Production Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2024.xxxxxx>
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2014). Cooperative learning in the 21st century. *Anales de Psicología*, 30(3), 841–851.
- Kaelan. (2017). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi. Kemendikbud RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Profil Pelajar Pancasila. Pusat Penguatan Karakter/Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Pendidikan Pancasila. Pusat Perbukuan, Kemendikbudristek.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Ketenagakerjaan dan Ketahanan Industri.
- Khan, M. (2025). Investigating the impact of organizational citizenship behavior on supply chain performance and corporate sustainability. *Cogent Business & Management*.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.
- Kolade, O. (2022). Employment 5.0: The work of the future and the future of work. *Technological Forecasting and Social Change*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Modul pendidikan antikorupsi untuk mahasiswa. ACLC KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan Tahunan Pencegahan Korupsi Indonesia. KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Menguntai Pendidikan Antikorupsi (Integrito, Edisi 3). KPK.
- Kusumastuti, A. (2021). SDM berkarakter sebagai penopang industri 5.0. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(2), 101–110.
- Lee, J., Kao, H. A., & Yang, S. (2018). Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment. *Procedia CIRP*, 16, 3–8.
- Lickona, T. (2004). Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues. Simon & Schuster.
- Lickona, T. (2012). Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues. Touchstone.
- Lickona, T. (2019). Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues. Bantam.
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2007). Eleven principles of effective character education. *Character Education Partnership*.
- Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties. *Heliyon*, 6(9), e04879. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04879>

- Mar, T. T. (2025). University students' character strengths and their impact on quality education in higher education. *Education Sciences*, 15(10), 1407.
- Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*, 15(1), 1–42. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbu015>
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Nakamura, H. (2019). Society 5.0: A human-centered vision for the future of society. *Japan Economic Review*, 70(4), 563–575.
- Narasimhan, R., Chen, V., & Choi, M. (2023). Digital multiculturalism: Challenges of tolerance and civic reasoning in algorithmic societies. *Journal of Digital Social Research*, 5(2), 44–63.
- OECD. (2020). *The impact of corruption on economic development*. OECD Publishing.
- Oktavia, G. (2024). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dimensi bergotong royong dalam pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 45–60.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD learning compass 2030: A series of concept notes*. OECD Publishing.
- Palanski, M. E., & Yammarino, F. J. (2007). Integrity and leadership. *European Management Journal*, 25(3), 171–184.
- Palanski, M. E., & Yammarino, F. J. (2007). Integrity and leadership: Clearing the conceptual confusion. *European Management Journal*, 25(3), 171–184.
- Rest, J. R. (1986). *Moral development: Advances in research and theory*. Praeger.
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in education: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Sairin, S. (2020). Transformasi nilai budaya dalam masyarakat digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 251–260.
- Salas, E., Reyes, D. L., & McDaniel, S. H. (2015). The science of teamwork: Progress, reflections, and the road ahead. *American Psychologist*, 70(6), 528–542.
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., & Agrusti, G. (2016). *Becoming citizens in a changing world: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016*. Springer.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas pembaruan pendidikan kewarganegaraan*. Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, T., & Azwar, M. (2020). Organizational integrity and work culture in industrial resilience. *Journal of Management Development*, 39(5), 721–734.
- Sutrisno, A., & Sari, E. (2021). Anti-corruption education and civic values in Indonesian universities. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(3), 45–68.
- Sutrisno, E. (2019). Budaya organisasi dan kinerja karyawan dalam konteks nilai-nilai lokal. *Jurnal Manajemen & Organisasi*, 10(1), 45–55.
- Suwignyo, A. (2019). Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(3), 387–408.
- Tjosvold, D., Poon, M., & Yu, Z. (2014). Team learning: Building shared mental models for high performance. *Journal of Management & Organization*, 20(2), 145–152.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. IEA.
- Transparency International. (2020). *Corporate integrity system: A guide for implementing anti-corruption measures*. Transparency International.
- Transparency International. (2020). *Preventing corruption through education*. Transparency International Secretariat.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. TI Secretariat.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *World Investment Report 2024: International production beyond the pandemic*. UNCTAD.
- UNESCO. (2017). *Education for sustainable development and global citizenship*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2019). *Digital citizenship education handbook*. UNESCO Publishing.
- Vărzaru, A. A., et al. (2024). Digital transformation and innovation: The influence of artificial intelligence and big data on innovation-driven revenues and social innovation. *Systems*, 12(9), 359.
- Vohra, N. (2015). *Inclusive workplaces: Lessons from theory and practice. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 34(5), 1–18.
- Wahab, A. (2016). *Pendidikan moral dan karakter dalam PKn*. RajaGrafindo Persada.

- Winataputra, U. S. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan Demokrasi. Universitas Terbuka.
- Winataputra, U. S. (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn). Bandung.
- Winataputra, U. S., & Wahab, A. (2012). Civic education: Konsep, pembelajaran, dan pengembangan. UPI Press.
- World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. World Bank Publications.
- World Economic Forum. (2016, March 10). Ten 21st-century skills every student needs. World Economic Forum.
- World Economic Forum. (2020). The future of jobs report 2020. WEF.
- World Economic Forum. (2020). The global risks report 2020. World Economic Forum.
- World Economic Forum. (2021). Global future council on transparency and anti-corruption: Harnessing technology for integrity. World Economic Forum.
- World Economic Forum. (2023). The future of jobs report 2023. WEF.
- Yilmaz, K., & Aykan, E. (2021). Tolerance and interpersonal harmony as predictors of organizational cohesion in modern industries. *Journal of Industrial Psychology*, 47(1), 1–12.
- Yuda, R., Ansori, M., & Al Faruqi, U. S. A. (2022). Exploring the role of culture and digital capital in establishing community resilience through creative economy in Indonesia. In A. P. Sunjaya, Y. B. Wang, R. Sagita, & D. Sugiharti (Eds.), *Indonesia post-pandemic outlook: Rethinking health and economics post-COVID-19* (pp. 185–208). BRIN Publishing.
- Yusoff, Y., Kadir, S. L. S. A., & Rahman, N. H. A. (2019). The influence of character education on students' academic performance and behavioral development: A case study in higher education. *Journal of Social Sciences Research*, 6(4), 359–367.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.